

SAMBANGI BUPATI BALANGAN, OMBUDSMAN SOROTI ISU PELAYANAN PUBLIK

Jum'at, 23 Juli 2021 - Maulana Achmadi

Balangan - Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyoroti beberapa isu pelayanan publik saat mengunjungi Kantor Bupati Balangan pada Kamis (22/7/2021). Hadi Rahman yang didampingi Asisten Ombudsman Kalsel Sopian Hadi, Yeni Aryani dan Rujalinor membahas di antaranya insentif nakes dalam penanganan covid-19, inovasi layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan stimulus ekonomi.Â Â

Hadi juga menyoroti perampangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Balangan. Perampangan tersebut menggabungkan beberapa OPD, dari sebelumnya 33 OPD menjadi 22 OPD.

Hadi Rahman kemudian mengingatkan bahwa ada OPD yang tidak bisa digabung tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. "DPMPTSP sebagai OPD yang memiliki tugas dan fungsi urusan perizinan dan penanaman modal, tidak bisa merumpun dan dirumpunkan dengan urusan pemerintah lainnya yang menjadi kewenangan daerah" jelasnya. Oleh karena itu perampangan terhadap DPMPTSP ini perlu dikaji kembali sesuai regulasi yang berlaku. "Jangan sampai dalam perampangan organisasi ini terjadi Maladministrasi karena bertentangan dengan peraturan di atasnya," tambahnya.

Bupati Balangan Abdul Hadi yang didampingi Sekda Balangan, Kabag Organisasi, Kabag Hukum, dan jajaran menjelaskan bahwa perampangan OPD untuk efisiensi terhadap APBD Kabupaten Balangan yang mengalami defisit anggaran. "Kami tetap memastikan tugas pokok dan fungsi setiap OPD tidak berkurang, meskipun ada perampangan organisasi," jelasnya.

Pada akhir pertemuan, Bupati Balangan mengucapkan terima atas segala saran dan masukan Ombudsman Kalsel terhadap pelayanan publik di Kabupaten Balangan. Terkait perampangan OPD ia berjanji akan melakukan evaluasi hal tersebut guna menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. (rj)